

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan suatu wujud nyata dari adanya peradaban di suatu wilayah. Eksistensi pemerintahan dibutuhkan oleh konstituen guna memperoleh legitimasi wilayah yang ditempatinya. Sehingga keberadaan suatu pemerintahan sangat diperlukan bagi manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Di Indonesia aktivitas pemerintahan secara garis besar dibagi menjadi empat golongan, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.

Seluruh golongan pemerintahan di Indonesia tersebut merupakan hierarki yang saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya, masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat selaku konstituennya. Untuk itu, setiap pelaku pemerintahan (birokrat) diwajibkan agar melaksanakan aktivitas pemerintahan secara baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, humanis, etis, estetis dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinaungi oleh suatu pemerintahan salah satunya harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena segala sesuatu yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki *value* atau terukur secara objektif dan terperinci. Sehingga akuntabilitas memiliki urgensi yang vital dalam setiap pelaksanaan aktivitas pemerintahan, dalam konteks ini akuntabilitas pemerintahan dapat dikaitkan dengan bidang kajian ilmu ekonomi yakni akuntansi sektor publik.

Konsepsi akuntansi sektor publik dalam menelaah proses dan kegiatan pada bidang pemerintahan lebih cocok digunakan ketimbang akuntansi sektor privat. Dalam konsep keilmuan akuntansi sektor publik sendiri memiliki beberapa telaah fokus seperti dana alokasi umum, dana

alokasi khusus, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, kenaikan anggaran, belanja modal, kelemahan pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Penulis memilih empat fokus kajian, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi pada awalnya di prakarsai oleh Ricardo dan Malthus yang menganalisis perekonomian di Inggris, pada pertengahan abad ke-20 teori pertumbuhan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama digagasi oleh Harrod pada tahun 1939 dan tahun 1948 serta Domar pada tahun 1947, kemudian gelombang kedua diprakarsai oleh Slo dengan teori *neoclassical of economic growth* tahun 1956 dan Swan pada pertengahan tahun 1950. Selanjutnya gelombang ketiga dikemukakan oleh Romer dan Lucas pada tahun 1998, meskipun kedua ahli ekonomi klasik ini berbeda sekali pandangannya dengan Adam Smith yang optimis, Ricardo dan Malthus justru pesimis. Adapun perbedaan antara Adam Smith dan kedua ahli tersebut disebabkan adanya pandangan yang berbeda mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Setiyawati dan Hamzah (2015), secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>2</sup> Secara praktis pendapat yang dikemukakan oleh Setiyawati dan Hamzah tersebut mengacu pada adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi.

<sup>1</sup> Aulia Afafun Nisa, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1 Jilid 2, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hal. 205.

<sup>2</sup> Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4 No. 2, Bangkalan : Universitas Trunojoyo, 2015, hal. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan pada observasi penelitian, Peneliti menemukan sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah mengenai pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diungkapkan dari laman Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pada 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat dibandingkan 2019. Ekonomi Provinsi Jambi pada 2020 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar 4,40%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,71%, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,02%.

Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)**

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	17 728,32	18 661,33	19 655,79	18 918,89	19 515,00	20 529,73
2.	Kota Sungai Penuh	4 183,87	4 388,18	4 607,81	4 600,23	4 768,84	4 980,84
3.	Kab. Batang Hari	10 634,36	11 147,66	11 713,38	11 662,61	12 227,99	13 728,62
4.	Kab. Bungo	11 510,00	12 045,80	12 557,97	12 507,63	13 144,00	13 734,00
5.	Kab. Kerinci	5 784,49	6 069,60	6 326, 54	6 559, 98	6 822, 79	7 125, 04
6.	Kab. Merangin	8 621, 91	9 052,64	9 443,00	9 532,17	10 046, 46	10 640, 54
7.	Kab. Muaro Jambi	14 655,06	15 389, 57	16 126,72	16 186, 86	16 847, 01	18 182, 03
8.	Kab. Sarolangun	9 808, 60	10 279, 95	10 757, 77	10 729, 47	11 396, 00	12 163, 00
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	27 421, 79	29 279, 46	30 744, 99	30 559,42	30 976, 20	31 866, 59
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	16 748, 26	17 241, 20	17 967, 59	17 349, 98	17 373, 49	17 471, 91
11.	Kab. Tebo	9 239, 00	9 700,00	10 161, 00	10 159, 00	10 597, 00	11 262, 58

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi.

Merujuk pada data dalam tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa produk domestik regional bruto yang merupakan representasi dari pertumbuhan ekonomi di setiap daerah senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, kesebelas wilayah yang ada di Provinsi Jambi tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini merupakan nilai tambah yang menjadi sisi positif dari pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.<sup>3</sup>

Persoalan lain yang peneliti temukan dalam observasi penelitian adalah mengenai dana alokasi umum di wilayah Pemerintah Provinsi Jambi yang masih terjadi misinterpretasi pengelolaan atas jenis anggaran tersebut. salah satu persoalan yang mengemuka dalam konteks Dana Alokasi Umum adalah sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dana transfer daerah yang selama ini dialokasikan melalui APBN tak banyak membantu dalam percepatan pembangunan. Sebab,

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 205-206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagian besar dana itu habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Masalahnya, selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Kajian *Institute for Development of Economies and Finance* (Indef) menunjukkan adanya korelasi positif antara dana transfer dengan indeks gini. Artinya dana transfer daerah justru mendorong ketimpangan pengeluaran. Secara statistik, misalnya, dana transfer umum memiliki korelasi positif dengan indeks gini pada tingkat signifikansi *p-value* 0,02 dan koefisiensi korelasi sebesar 0,0126. Artinya setiap 1 persen kenaikan DAU, ketimpangan justru akan melebar sebesar 0,01. Ekonom dan peneliti dari Indef, Enny Sri Hartati menyampaikan penyebab utama permasalahan tersebut adalah penggunaan dana yang tidak sesuai. Karena itu, menurut Enny, selama ini dana transfer umum memang tidak efektif untuk menggenjot pembangunan di daerah. DAU yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.<sup>4</sup> Sehingga, DAU dapat dikatakan tidak memenuhi ekspektasi Pemerintah Pusat selaku pihak yang menyalurkan DAU kepada setiap Pemerintah Daerah. Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai dana alokasi umum di Provinsi Jambi dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 Dana Alokasi Umum di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi  
(Milyar Rupiah)**

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	714, 78	714,78	759, 71	690, 72	675, 29	675, 29
2.	Kota Sungai Penuh	419, 52	433, 53	452,46	414,33	405, 07	405, 07
3.	Kab. Batang Hari	605, 74	605, 74	632, 05	571, 90	559, 82	560, 13
4.	Kab. Bungo	636, 00	636, 00	657, 96	602, 61	589, 40	589, 40
5.	Kab. Kerinci	589, 20	589, 20	613, 63	570, 39	557, 77	557, 77

<sup>4</sup> Tirto.id, *Dana Transfer Umum Ke Daerah Tak Efektif, Pembangunan Mandek?*, Artikel Daring, diakses melalui : <https://tirto.id/dana-transfer-umum-ke-daerah-tak-efektif-pembangunan-mandek-dbFG>, diakses pada 2 Maret 2023 (03.32 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6.	Kab. Merangin	718, 85	718, 85	742, 33	669, 44	658, 73	658, 89
7.	Kab. Muaro Jambi	670, 34	670, 34	700, 82	631, 35	619, 50	620, 13
8.	Kab. Sarolangun	583, 15	583, 15	600, 49	539, 03	529,16	529, 50
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	506, 59	506, 59	537, 18	490, 34	479, 38	479, 79
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	533, 20	540, 40	565, 64	523, 90	514, 77	514, 99
11.	Kab. Tebo	582, 31	582, 31	599, 22	536, 52	528, 39	528, 68

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Merujuk pada tabulasi data di atas, maka dapat diketahui bahwa dana alokasi umum yang diterima oleh masing masing daerah di Provinsi Jambi memiliki perbedaan. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang termasuk dana perimbangan Pemerintah Pusat yang disalurkan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Sehingga, nilai yang diterima masing-masing wilayah memiliki perbedaan yang elementer sesuai perhitungan atau kalkulasi kontribusi yang diberikan oleh daerah tersebut.

Dalam aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh institusi-institusi pemerintah, baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah dikenal pula istilah Dana Alokasi Khusus. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran nilai dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>5</sup>

Sementara itu dalam konteks dana alokasi khusus, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki persoalan berupa adanya ancaman tidak dapat mencairkan dana alokasi khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Alokasi Khusus, Ebook*, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Provinsi Jambi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi yang mengakui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan dokumen antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya kekhawatiran akan tidak efektifnya dana alokasi khusus yang dikucurkan untuk program reboisasi yang mana salah satunya adalah milik Pemerintah Provinsi Jambi.<sup>6</sup> Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai dana alokasi khusus di Provinsi Jambi dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3 Dana Alokasi Khusus di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)**

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	95,54	154,42	110,91	129,93	108,25	57,74
2.	Kota Sungai Penuh	54,34	48,29	60,66	50,90	43,80	40,02
3.	Kab. Batang Hari	63,25	58,51	77,30	94,94	118,89	101,43
4.	Kab. Bungo	119,35	100,24	111,45	92,12	54,79	54,37
5.	Kab. Kerinci	95,65	54,93	82,14	50,90	73,30	42,65
6.	Kab. Merangin	90,57	85,41	138,34	113,31	110,37	52,36
7.	Kab. Muaro Jambi	63,41	74,05	76,95	55,88	83,07	76,99
8.	Kab. Sarolangun	77,91	70,95	130,65	86,15	78,57	84,17
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	55,16	56,78	84,37	91,23	74,78	70,01
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	97,55	121,19	118,89	85,42	114,07	117,39
11.	Kab. Tebo	50,84	45,43	74,75	57,13	113,29	124,41

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

<sup>6</sup> Bappenas, *DAK Reboisasi Dikhawatirkan Tidak Efektif*, Artikel Daring, diakses melalui <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F10524/DAK%20Reboisasi%20Dikhawatirkan%20Tidak%20Efektif.htm>, diakses pada 3 Mei 2020 (02.24 WIB).

Berdasarkan pada data dalam tabulasi dana alokasi khusus yang diperoleh masing-masing Pemerintah Daerah memiliki nilai yang bersifat fluktuatif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerimaan akan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai operasional pemerintahannya dengan baik. Sehingga, dana alokasi umum di masing-masing Pemerintah Daerah memiliki sifat yang fluktuatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.<sup>7</sup>

Berbagai persoalan yang mengemuka dalam aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi tersebut merupakan suatu indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan suatu reformasi birokrasi yang menyeluruh sehingga tidak terjadi adanya potensi *fraud* di wilayah pemerintahannya. Kondisi ini juga akan memicu terjadinya suatu perbaikan sistem pengelolaan anggaran yang berbasis pada keterbukaan dan kalkulasi yang rasional. Sehingga, pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilakukan secara baik.

Selain beberapa persoalan yang menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki persoalan lain yakni mengenai pendapatan asli daerah.

<sup>7</sup>Aulia Afafun Nisa, *Op.Cit.*, hal. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Salah satu persoalan yang mengemuka adalah target pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 turun atau defisit pendapatan. Hal tersebut dipicu adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya perubahan target pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dan juga dipicu oleh pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan dalam kasus COVID-19. Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah di 11 Wilayah Kab/kota Provinsi Jambi**  
(Milyar Rupiah)

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	320, 93	328, 90	364, 14	403, 48	419, 56	465, 89
2.	Kota Sungai Penuh	42, 63	42, 63	47, 07	48,17	46,24	99, 14
3.	Kab. Batang Hari	87,19	112, 00	141, 50	164, 58	138, 01	138, 86
4.	Kab. Bungo	127, 87	137, 66	151, 30	153, 25	145, 14	165, 27
5.	Kab. Kerinci	74, 24	80, 24	104, 74	108, 16	85, 91	33, 78
6.	Kab. Merangin	87, 05	85, 43	86, 63	95, 22	108, 34	118, 22
7.	Kab. Muaro Jambi	58, 75	76, 90	80, 02	99, 63	102, 26	106, 49
8.	Kab. Sarolangun	75, 47	99, 78	121, 16	95, 43	106, 39	93, 15
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	90, 35	85, 00	100, 28	104, 11	120, 00	96, 14
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	41, 95	73, 17	47, 59	52, 17	53, 90	67, 93
11.	Kab. Tebo	74, 32	72, 82	74, 39	77, 13	77, 13	82, 97

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Dan Menurut Yani (2001: 110) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengaluran nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk membantu dari segi pertumbuhan ekonomi yang mana melalui pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yakni menetralsisir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Sehingga bisa membantu dalam pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Menurut halim (2014: 16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Bahar (2009: 156) yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, dengan adanya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur masyarakat tersebut maka dapat membantu dalam sektor pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2014: 16) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipunggut perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain- lain PAD yang sah. Dari hasil Pendapatan Asli Daerah tersebut terdapat adanya kesinambungan bahwa Pendapatan Asli Daerah itu dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

Menurut Mafahir & Soelistiyo dalam Helena Louise Panggabean and Danarti Hariani, menunjukkan bahwa jika peningkatan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, penurunan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maka akan berdampak juga pada penurunan pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Helena LouisePenggabean dan Danarti Hariani, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Brata dalam Ni Wayan Ratna Dewi IDGD Suputra menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Tambunan, juga menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber perbelanjaan daerah, jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Afafun Nisa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gordianus Dedi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, berbeda

Ekonomi sebagai Variabel Intervening tahun 2015-2019”. Owner: Riset dan Kumal Akuntansi, Vol 6, No. 2, (2022) Universitas Muhammad Tamrin, Hal. 2

<sup>9</sup> Ni Wayan Ratna Dewi dan IDGD Suputra, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” E-Jurnal Akuntansi Vol 18, no. 3 (2017) Universitas Udayana, hal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah Seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing variabel dependennya sesuai dengan analisis jalur masing-masing variabel, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Badrudin, Ernita, dkk yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Metta Maheni dan Maryono yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada uraian permasalahan dan juga persoalan penelitian terdahulu yang sudah penulis deskripsikan pada latar belakang, Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2017-2021”**.

<sup>10</sup> Manek dan Badrudin, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur”, jurnal telaah bisnis, Vol 17, No.2, (2016), hal.81-98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka selanjutnya penulis di dalam penelitian ini menemukan beberapa fenomena yang dirumuskan dalam identifikasi masalah yaitu, sebagai berikut ini :

1. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi mengalami perlambatan dimana pada tahun 2020 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar 4,40%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,71%, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,02%.
2. Kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Jambi pada 2020 ini lebih melambat dibandingkan 2019;
3. Pada bulan September tahun 2022 provinsi jambi mengalami inflasi sebesar 8,55%, yang mana ada sekitar 5 komoditi yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Jambi, yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, BBM rumah tangga, kemudian mobil, mobil artinya ada penjualan mobil yang DP nya murah.
4. Selama ini DAU lebih banyak digunakan untuk belanja modal yakni gaji pegawai yang notabe tidak efektif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional;
5. Adanya ketimpangan pengeluaran DAU dimana setiap 1 persen kenaikan DAU, ketimpangan justru akan melebar sebesar 0,01 persen;
6. Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi terjadinya inefektivitas dana alokasi khusus untuk program reboisasi;
7. Pemerintah Provinsi Jambi mengalami defisit pendapatan ditahun 2021, hal tersebut dipicu adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan adanya perubahan target pendapatan pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan juga dipicu oleh pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan dalam kasus COVID-19 Dan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Target Pendapatan asli daerah Provinsi Jambi meleset dari tujuan semula akibat banyaknya agenda baru yang harus diselesaikan selama menangani persoalan mengenai pandemi covid-19.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa persoalan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Tahun periode yang digunakan adalah 2017-2022;
2. Penelitian ini akan membahas tentang kajian-kajian dalam pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah; dan
3. Tempat penelitian di Pemerintah Provinsi Jambi;

### D. Rumusan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah penulis deskripsikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022?

## E. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperluas hasil penelitian tersebut untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022;
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022; dan
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu akuntansi sektor publik dalam kajian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jambi pada periode 2017-2022.

### 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk dapat memberikan sumbangsih berupa implementasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan setiap aktivitas organisasi pemerintahan pada Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Daerah Tingkat I di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut Peneliti sampaikan manfaat praktis dalam beberapa bagian yang lebih spesifik sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.

c. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi organisasi pemerintahan terkait dalam hal ilmu akuntansi sektor publik yang menyangkut kajian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang diselenggarakan pada Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022 secara khusus dan pada tahun-tahun mendatang secara umum.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep kajian p dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022.

## G. Sitematika Penulisan

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian. Dan terdapat sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang kajian pustaka, studi relevan, kerangka pemikiran, definisi operasional variable dan hipotesis penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang didalamnya berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode penarikan sampel, metode pengolahan dan analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum objek penelitian hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti memberikan uraian singkat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memberikan saran – saran dari analisis data yang dapat dijadikan bahan acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi